

Pergulatan Identitas Tionghoa Muslim : Pengalaman Yogyakarta

Rezza Maulana

Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL), Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract: This paper throws light on the historical development of Tionghoa Muslim in Yogyakarta. Using historical analysis, it found that the origins of Tionghoa Muslim can be traced back to the early 18th century of Javanese kingdom when, for instance, Sultan Hamengku Buwono III appointed a Muslim of Tionghoa origin to be his regent. In the new order era, Tionghoa Muslim in Yogyakarta kept their low profile against the backdrop of New Order regime's policy of assimilation. However, after the gate of democratisation was opened in the late 1990's, Tionghoa Muslims in this area have enjoyed a freedom to express their identity by, among others, celebrating Chinese New Year's festival in the public. The article then concludes that the construction of Tionghoa Muslim's identity in Yogyakarta is very much affected by the government policy (politics).

Keywords: Tionghoa Muslim, Yogyakarta, identitas.

“Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia mempunyai kebudayaan yang unik, yang merupakan perpaduan dari unsur-unsur kebudayaan Tionghoa, Islam, Eropa, dan pribumi-lokal.”

— Amen Budiman¹

A. Pendahuluan

Semenjak lengsernya Soeharto dari kursi presiden Republik Indo-

nesia pada Mei 1998, terjadi perubahan secara signifikan pada posisi orang Tionghoa di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden terpilih pada 1999 mengeluarkan kebijakan untuk merevitalisasi adat istiadat dan kepercayaan Tionghoa sekaligus mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 tentang pelarangannya. Kemudian Presiden Megawati yang menggantikan Gus Dur melanjutkan dengan keputusan menjadikan Imlek (tahun baru China) sebagai hari libur nasional.

Perubahan iklim politik tersebut, langsung atau tidak, mendorong orang Tionghoa untuk lebih berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik perseorangan maupun berkelompok, termasuk kalangan Tionghoa Muslim yang jumlahnya lebih sedikit dibanding kelompok Tionghoa non-Muslim (*minority within minority*).

Dewasa ini, kelompok Tionghoa Muslim ini mulai melakukan konsolidasi baik ke dalam maupun ke luar, dengan mengendarai organisasi yang bernama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d/h Pembina Iman Tauhid Indonesia (PITI). Selain menarik perhatian calon anggota dengan berbagai kegiatan dan juga membangun masjid dengan arsitektur Tionghoa, mereka mulai bekerja sama dengan organisasi Tionghoa yang lain, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya, termasuk peringatan hari-hari besar tradisi China seperti Imlek dan Peh Cun. Kecenderungan ini banyak terjadi di berbagai wilayah dengan jumlah orang Tionghoa cukup tinggi, dan salah satunya adalah Kota Yogyakarta.

Awal mula saya menggeluti tema Tionghoa Muslim saat mengikuti kuliah sosiologi agama masyarakat minoritas di Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada 2005. Kemudian, untuk memperdalam pemahaman mengenai masyarakat minoritas, saya mengangkat tema tersebut sebagai tugas akhir, dengan fokus pada keluarga Tionghoa Muslim di Yogyakarta pada 2008.

Sampai sekarang, saya masih berkomunikasi dengan komunitas Tionghoa Muslim dan bahkan beberapa kali terlibat dalam berbagai kegiatan kelompok tersebut, meskipun saya tidak berasal dari keluarga Tionghoa. Karena intensitas saya dalam interaksi dengan mereka,

apalagi saya tidak berpindah tempat tinggal dalam sepuluh tahun terakhir dari Kota Yogyakarta, saya dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan perkembangan terbaru dari dalam komunitas tersebut.

Di samping itu, karena faktor kedekatan, saya juga bisa mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka di masa lalu baik sebagai individu maupun kelompok (organisasi). Dengan kata lain, telah muncul rasa saling percaya dan usaha untuk memahami satu sama lain dalam situasi yang wajar tanpa paksaan.

B. Orang Tionghoa di Yogyakarta

Sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta, akibat Perjanjian Giyanti pada 1755, banyak orang dari berbagai penjuru Nusantara yang berdatangan ke kota ini untuk berdagang, termasuk pedagang Tionghoa.² Lama-kelamaan jumlah pedagang itu meningkat dan sebagian besar menetap di Kotapraja. Oleh karena itu, Pemerintah Belanda mengangkat seorang kapiten Tionghoa bernama To In sebagai penanda komunitas tersebut.³ Pendapat lain menambahkan, orang Tionghoa yang mula-mula datang ke Yogyakarta kebanyakan kaum lelaki. Kemudian dari mereka banyak yang menikah lintas suku dengan perempuan setempat.⁴

Mengenai lokasi awal permukiman orang Tionghoa juga terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat mengatakan orang Tionghoa mulanya berada di daerah Pecinan yang terletak di sebelah utara Pasar Gede. Meskipun sudah diatur oleh Belanda dan mendapat ancaman denda sebesar f 25-f 100, ternyata sampai 1830 masih ada orang Tionghoa yang tinggal di luar daerah tersebut dan menyebar di beberapa tempat.⁵ Mengikuti perkembangan pembangunan kota, pada 1867 permukiman komunitas Tionghoa menyebar di sekitar ibukota, meliputi Ketandan, Gandekan, Ngabean, Ngadiwinatan, Suronatan, Gading, Ngasem, daerah Patuk ke utara, hingga rel kereta api di sebelah Tugu. Bahkan di daerah Pakualaman dan Godean, terdapat sejumlah permukiman orang Tionghoa.⁶

Pendapat lain menjelaskan bahwa orang Tionghoa mula-mula berada di kampung Kranggan dan kemudian menyebar ke tempat-

tempat lain yang baik untuk perdagangan (dekat pasar atau pinggir jalan utama). Jumlah mereka tidak terlalu besar, kurang-lebih 2-3 persen dari seluruh penduduk. Sedangkan orang Arab ada di kampung Sayidan dan orang Eropa di Loji Kecil, Bintaran, Jetis, hingga Kotabaru. Kemudian karena semakin bertambahnya jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta, atas seizin Kesultanan, mereka diperbolehkan menempati selatan Kranggan hingga utara rel kereta api. Lama-kelamaan orang Tionghoa diperkenankan tinggal di antara selatan rel kereta api hingga batas Pasar Gede (Beskalan dan Ketandan).⁷

Dewasa ini, permukiman orang Tionghoa di Yogyakarta mengalami penyebaran yang cepat. Beberapa faktor yang memengaruhi pilihan lokasi adalah kemudahan dalam mengakses pasar dan klenteng, selain lokasi strategis di pinggir jalan utama (provinsi atau kabupaten) dan berdekatan dengan terminal atau bandara.

Mengenai jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta, data paling awal ditunjukkan dalam catatan Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Jawa (1811-1816). Data ini mencatat bahwa jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta sebesar 2.202 jiwa dengan perincian: jumlah laki-laki 1.201 jiwa dan perempuan 1.001 jiwa. Mereka terkonsentrasi di sekitar pasar, di antara benteng Belanda (Vredeburg) dan Kepatihan Danurejan.⁸

Pada 1910 jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta sejumlah 5.266 jiwa atau 6,61 persen dari jumlah seluruh penduduk Yogyakarta sebesar 79.567 jiwa.⁹ Selanjutnya pada 1920 jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta meningkat menjadi 7.250 jiwa. Warga Tionghoa yang tinggal di Kotaraja sebesar 5.471 jiwa dan sisanya tinggal di pedesaan.¹⁰

Pada sensus 1930, warga Tionghoa di Yogyakarta mencapai 12.637 jiwa. Sebanyak 9.189 jiwa tinggal di kota dengan jumlah laki-laki sebesar 4.998 jiwa dan perempuan 4.191 jiwa. Sisanya tersebar di luar kota. Perlu ditambahkan juga bahwa di Yogyakarta terdapat empat suku pokok Tionghoa, yaitu Hokkian, Kwongfu, Hakka, dan Teochiu.¹¹

Kemudian berdasarkan perhitungan Sensus Penduduk 2000,¹²

jumlah orang Tionghoa di Provinsi Yogyakarta sebesar 9.942 jiwa, sementara yang berstatus warga negara asing (RRC) sebesar 488 jiwa.¹³ Dari seluruh penduduk tersebut, yang berdomisili di pedesaan sebesar 76 jiwa dan di perkotaan sebesar 9.866 jiwa.¹⁴

C. Dinamika Tionghoa Muslim

Orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta mula-mula merupakan saudara (adik) dari saudagar Oei Tek Ho asal Banyumas, yaitu Oei Tek Biau, yang kemudian dikenal sebagai Kyai Tumenggung Reksonegoro I.¹⁵ Posisi awalnya adalah salah satu bupati di Semarang, yang kemudian pindah ke Yogyakarta atas permintaan Sultan Hamengku Buwono (HB) I. Selain itu, Kyai Tumenggung Reksonegoro juga menjadi penasihat Sultan dalam bidang kerohanian, termasuk mengurus dan memimpin perayaan adat atau agama seperti grebeg.

Kemudian jejak yang paling menonjol adalah tokoh Tan Jin Sing (1760-1831), seorang kapiten Tionghoa yang diangkat sebagai bupati Yogyakarta oleh Sultan HB III atas jasanya dalam membantu mendapatkan takhta dari Sultan HB II. Sebelum diangkat sebagai bupati dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat, Tan Jin Sing masuk Islam bersama istrinya atas bimbingan Kyai Reksonegoro.

Menariknya, dari sumber ini, terdapat juga uraian Kyai Reksonegoro dan istrinya untuk memantapkan Tan Jin Sing memeluk Islam menjelang pengangkatan sebagai bupati. Menurut Kyai Reksonegoro dan istrinya, alasan memeluk Islam ialah kebanyakan bangsawan Jawa (Bupati) adalah orang Muslim. Alasan kedua, menjadi Muslim bagi seorang Tionghoa bukanlah hal aneh, karena dalam sejarah ada tokoh Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang Tionghoa Muslim asli dari negeri China.¹⁶

Selain Oei Tek Biau dan Tan Jin Sing, Tionghoa Muslim Yogyakarta lainnya adalah dua bersaudara dari keluarga Tjan—kemudian salah satunya mendapat anugerah dari Mangkunegara III berupa gelar tumenggung dan lainnya mendapat sebidang tanah. Dari saudara yang mendapat tanah inilah terdapat keturunan Tionghoa Muslim bernama Tjan Tjoe Som dan adiknya Tjan Tjoe Siem. Kakak-adik ini lulusan Universitas Leiden, Belanda. Sang kakak ahli sinologi,

sedangkan adiknya ahli kebudayaan Jawa yang mengajar di Universitas Indonesia dan Nanyang University, Singapura, serta pada akhirnya diangkat menjadi guru besar luar biasa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 1978.¹⁷

Mengenai data yang lebih valid tentang jumlah Muslim Tionghoa masa itu, saya mengalami kesulitan karena sumber pada masa Pemerintah Belanda dalam menghitung penduduk Tionghoa tidak menggunakan kategori agama. Baru sekitar 1970-an, saat wacana Tionghoa Muslim mulai muncul ke publik, diperkirakan ada sekitar 150.000 Tionghoa yang masuk Islam di Indonesia. Tapi angka ini dianggap tidak realistis oleh H. Junus Jahja. Menurutnya, jumlah Tionghoa Muslim hanya sekitar 0,5% dari jumlah keseluruhan orang Tionghoa di Indonesia yang berjumlah 2,5 juta orang atau sekitar 12.500 jiwa.¹⁸

Bicara tentang konteks Yogyakarta, jumlah Tionghoa Muslim yang dapat dilacak berdasarkan data monografi per kecamatan tahun 2007 sejumlah 788 jiwa (8 persen) dari 9.055 orang Tionghoa yang tinggal di Kota Yogyakarta.¹⁹

Tak ada lokasi khusus seperti kampung Pecinan. Mereka tersebar di kampung-kampung yang ada di Kota Yogyakarta, seperti Krapyak, Wirobrajan, Samirono, dan Jetis. Beberapa mereka berpindah-pindah tempat tinggal beberapa kali. Biasanya mereka keluarga muda atau salah satunya mualaf. Hal ini bisa dimaklumi karena orang Tionghoa yang telah masuk Islam sering kali terusir dari rumah orangtuanya yang non-Muslim. Selain itu, mualaf Tionghoa merasa tak nyaman tinggal bersama lagi dengan saudaranya yang non-Muslim.

Menurut Suryadinata,²⁰ fenomena orang Tionghoa yang masuk Islam pada 1970-an bukan merupakan akibat dari peristiwa kup tahun 1965 saja, melainkan juga akibat dari perkembangan Islam di panggung sosial politik, interaksi intensif dengan Muslim di sekitar mereka, dan beberapa hal lainnya yang lebih pragmatis seperti memperlancar bisnis atau menyelesaikan “masalah Tionghoa” di Indonesia.

D. Usaha-usaha Kolektif dan Personal

Gerakan dakwah pada orang Tionghoa mulai menyebar di berbagai daerah sekitar 1970-an lewat organisasi yang dipimpin oleh H. Abdul Karim Oey Tjeng Hien dan Kho Goan Tjin, yakni Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Beberapa tokoh Islam di Yogyakarta yang aktif di Persaudaraan Djamaah Haji Indonesia (PDHI) berinisiatif untuk mengajak segelintir Tionghoa Muslim di Yogyakarta mendirikan PITI koordinator wilayah. Mereka antara lain Prof. KH. Abdul Kahar Muzzakir, GBPH H. Prabuningrat, KH. M Djoenaid, KH. R. Therus, H. Muhadi Munawir, KH. Ali Maksum, dan KH. A. Mukti Ali.²¹

Pada periode pertama kepengurusan PITI DIY, terpilih sebagai ketua adalah H. Iksan Budi Santoso dan wakilnya KH. Ali Maksum, sedangkan sekretaris I dan II masing-masing adalah Ahmad Sutanto dan Moh Amien Mansoer. Jabatan sebagai bendahara dipegang oleh Yudi Kurniawan.

Peresmian PITI Yogyakarta pada 20 September 1970, yang kemudian dijadikan sebagai hari berdirinya PITI Yogyakarta, dihadiri langsung oleh H. Karim Oey dan beberapa pejabat pemerintah pusat seperti Menteri Sosial H. M.S Mitardja dan Brigjen Muklas Prowi (penasihat keislaman TNI Angkatan Darat).

Kegiatan PITI DIY awalnya bergabung dengan kegiatan PDHI, seperti pengajian rutin di kantor PDHI atau secara bergilir di rumah-rumah anggota PDHI dengan sarana dan prasarana dari PDHI pula. Selain itu, PITI juga membantu orang Tionghoa yang mendapat masalah ketika baru masuk Islam atau menjadi mualaf, misalnya ketika diusir oleh keluarganya. Contohnya adalah seorang mualaf perempuan bernama Be Han Nio asal Banyuwangi. Karena tak ada dukungan dari keluarganya, PITI DIY memberikan santunan pendidikan di salah satu lembaga pendidikan keperawatan di Kota Yogyakarta.²²

Tampaknya organisasi yang baru berdiri ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari pengurusnya. Ketuanya, H. Iksan Budi Santoso dan Sekretaris Ahmad Sutanto secara terbuka mengakui sebagai Tionghoa Muslim. Mereka sering diundang untuk menjadi penceramah atau ustaz dalam pengajian di berbagai tempat seperti

Kulonprogo dan Klaten. Bahkan setiap Ramadan, jadwal mereka menjadi penceramah selalu padat.

Sayangnya pemerintah lewat Jaksa Agung keberatan dengan penggunaan nama “Tionghoa” yang terkesan eksklusif dalam akronim PITI, yakni “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia”. Lewat surat tertanggal 15 Juli 1972 No. MA/244/1972, Menteri Agama RI H.A. Mukti Ali meminta untuk meniadakan usaha yang dapat menjurus ke arah eksklusivisme dan mempercepat proses asimilasi serta pembauran warga negara keturunan. Oleh karena itu, pimpinan PITI pusat membubarkan PITI dengan singkatan “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia” dan mendirikan organisasi baru bernama “Persatuan Iman Tauhid Indonesia” yang juga disingkat PITI.

Selain itu, niat PDHI, karena melihat potensi dalam organisasi PITI tersebut, untuk mendirikan lembaga pendidikan bahasa Mandarin di Yogyakarta bersama PITI, mengalami tantangan dari Pangkoptib Sudomo. Pengurus PITI DI Yogyakarta bahkan mendapat panggilan dari Kejaksaan untuk mengklarifikasi rencana tersebut.²³

PITI Yogyakarta pernah mengalami stagnasi dalam usaha berdakwah di kalangan orang Tionghoa. Beberapa faktor antara lain, pertama, ketua baru yang menggantikan ketua lama tak menonjolkan ketionghoannya. Kedua, keterputusan koordinasi PITI Yogyakarta dengan PITI pusat karena PITI pusat mengalami stagnasi akibat kepengurusannya dikendalikan militer. Ketiga, belum maksimalnya manajemen organisasi, utamanya kesulitan dalam mendapatkan dana operasional. Hal ini salah satunya dikarenakan belum bekerjanya mekanisme iuran anggota. Keempat, jumlah anggota yang sedikit akibat enggannya orang Tionghoa Muslim bergabung dalam organisasi akibat stigma bahwa masuk Islam membuat derajat sosialnya menurun ke tingkat kaum pribumi.

Sekitar pertengahan 1980-an, PITI Yogyakarta mulai bergerak kembali, salah satunya karena kepengurusan baru didukung sepenuhnya secara finansial oleh Budy Setyagraha yang menjadi ketuanya. Sebagai pengusaha yang cukup sukses, Budy Setyagraha juga secara terbuka mengakui ketionghoannya. Dia tidak merupakan penceramah di bidang agama, namun merangkap sebagai aktivis

sosial politik.

Usahnya mungkin bisa dinilai sebagai pembentukan citra bahwa orang Tionghoa yang masuk Islam tak perlu malu dan takut mendapatkan tantangan. Di satu sisi hal ini bisa dianggap sebagai nilai tawar orang Tionghoa Muslim di hadapan orang-orang Tionghoa non-Muslim dan di hadapan pemerintah. Apalagi di akhir jabatannya sebagai ketua PITI DI Yogyakarta (1997-2003), Budy Setyagraha terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi DIY periode 1999-2004 melalui Partai Amanat Nasional (PAN).²⁴

Menurut analisis saya, pada masa Orde Baru tampaknya usaha kolektif berupa organisasi (PITI) menjadi alat untuk mewujudkan *cara* masing-masing pihak yang berbeda dan belum ada titik temunya, sehingga organisasi terlihat pontang-panting ke sana-kemari. Satu pihak ingin meluruskan jalan sebagai organisasi dakwah dengan ciri karakternya yang unik (etnisitas), dan pihak lain ingin menjadikan PITI sebagai media dakwah tanpa menonjolkan keunikannya serta menyerasikan dengan program pemerintah dalam hal pembauran.

E. Geliat Pasca-1998

Yang terpenting dari zaman ini adalah adanya kesadaran dari Tionghoa Muslim bahwa persoalan pembauran bukan semata masalah horisontal antara orang Tionghoa dan non-Tionghoa, melainkan juga masalah vertikal yang terkait kebijakan pemerintah terhadap orang Tionghoa secara umum. Ini kemudian mendorong Tionghoa Muslim untuk merenungkan kembali hak dan kewajiban mereka sebagai komponen bangsa secara utuh.

Secara organisasi, PITI pusat kemudian merespons perubahan pasca-1998 dengan mengadakan Muktamar Nasional II pada 2000 di Jakarta. Muktamar ini diniatkan untuk membangkitkan kembali semangat dan struktur PITI. Salah satu programnya adalah konsolidasi pengurus-pengurus wilayah dan daerah yang telah terbentuk selama ini di berbagai penjuru di Indonesia. Kemudian pada 2005 diselenggarakan Muktamar Nasional III di Surabaya yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla. Muktamar tersebut juga memutuskan untuk menggunakan kembali kepanjangan

“Persatuan Islam Tionghoa Indonesia” di samping “Persatuan Iman Tauhid Indonesia”.

Visi PITI yang tertuang dalam Anggaran Dasar hasil Mukhtamar Nasional II adalah mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* dalam rangka melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan (*kaffah*).²⁵ Penjelasan ini tampaknya tidak menunjukkan kecenderungan orientasi pada organisasi dakwah Islam mana pun seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atau merujuk pada aliran dalam Islam mana pun. Tapi jika melihat Program Kerja DPP PITI periode 2005-2010, terdapat program Pengembangan Pemikiran Keagamaan di urutan pertama meski tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Menariknya, di dalam Program Sosial Budaya dan Pendidikan, terdapat poin-poin spesifik antara lain, pertama, ikut menggali dan melestarikan budaya setempat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, menyosialisasikan budaya-budaya Islam bagi Tionghoa Muslim khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Ketiga, menyosialisasikan budaya-budaya Islam Tiongkok (dari RRC) kepada kaum Tionghoa Muslim dan masyarakat Indonesia.²⁶

Kembali ke konteks Yogyakarta, perkembangan organisasi di tingkat pusat ternyata sejalan dengan perkembangan yang terjadi di wilayah. Pada 2005, selang sehari perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharam 1426 H, Tionghoa Muslim merayakan Tahun Baru Imlek 2556. Perayaan tahun baru dua kebudayaan ini bisa berdekatan karena adanya kesamaan dalam penggunaan kalender tahunan yang berdasarkan perhitungan bulan (*lunar calendar*).

Bagi Tionghoa Muslim di Yogyakarta, merayakan Tahun Baru Imlek pada 2005 merupakan yang ketiga kalinya dilakukan secara terbuka. Pertama kali perayaan Imlek oleh warga Tionghoa Muslim terjadi pada Februari 2003 dan diselenggarakan di Masjid Syuhada, Kotabaru, Yogyakarta.²⁷

Dalam pandangan Tionghoa Muslim, perayaan Tahun Baru Imlek di masjid selain sebagai ungkapan rasa syukur, juga mereka ingin menunjukkan bahwa Imlek adalah bagian dari adat budaya warisan leluhur masyarakat Tionghoa yang bisa dirayakan semua golongan dan agama mana pun, terlepas dari ritual agama tertentu.

Perayaan Imlek oleh Tionghoa Muslim ini didukung oleh PITI Pusat dengan mengeluarkan surat imbauan perayaan Imlek dengan cara melakukan sujud syukur di masjid masing-masing. Surat khusus ini dikeluarkan setelah Muktamar Nasional III di Surabaya dengan No. 004/01/DPP.PITI/I/06.

Pada 2007, PITI Yogyakarta bahkan menjadi penggagas dan panitia penyelenggaraan Festival Imlek Bantul mulai 22 Februari hingga 4 Maret 2007. Rangkaian acaranya antara lain diskusi buku *Menjadi Jawa* karya Dr. Rustopo di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pentas barongsai, pameran dan bazar, pengobatan gratis, *hash* dan lomba baca berita Mandarin yang semua bertempat di Pasar Seni Gabusan, Bantul. Selain itu, juga diadakan pengajian akbar dengan dai Ustaz Iskandar, seorang Tionghoa Muslim dari Salatiga, di Masjid Agung Bantul.²⁸

Pada 2008 perayaan Imlek dilangsungkan di Masjid Al Husna, Iromejan, Gondokusuman, Yogyakarta. Rangkaian agenda peringatan Imlek diisi pengajian oleh Drs. Moh Damami M.Ag. dari UIN Sunan Kalijaga. Acara dimeriahkan dengan grup kasidah masjid setempat serta diakhiri dengan pemberian santunan kepada anak-anak sekitar masjid berwujud amplop merah (*angpao*).²⁹

Dalam beberapa momentum seperti pengajian bulanan, PITI Yogyakarta menyisipkan bahasa Mandarin dalam memberikan pengantar pengajian yang dilakukan oleh pembawa acara yang merupakan Tionghoa Muslim. Di samping itu, penceramah yang diundang sering kali adalah mereka yang tahu tentang budaya Tionghoa, antara lain Prof. Lasiyo dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada dan Drs. Moh Fahmi Muqoddas, M.Hum. dari Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

Selain itu, pernah juga diselenggarakan pameran kaligrafi Islam bermotif huruf Tionghoa (Han Zi) dengan perupa Winarso pada 10 Februari 2005 di Sanggar Kaligrafi, Maguwo, Banguntapan, Bantul. Hal yang cukup menarik perhatian juga adalah munculnya “makanan Tionghoa Muslim” di beberapa tempat seperti di Jalan Afandi (Gejayan), Jalan Monjali, dan Jalan Godean.

Keterlibatan PITI DI Yogyakarta juga tampak dari keikutsertaan

dengan membuka stan khusus yang tergabung dalam stan-stan asuhan Kantor Wilayah Kementerian Agama DI Yogyakarta dalam acara Pekan Raya Sekaten setiap tahun. Ini adalah salah satu sarana penguatan identitas dalam masyarakat. Terakhir yang saya amati adalah keikutsertaan PITI dalam Pekan Apresiasi Lintas Iman pada 2007 di Siti Hinggil, Alun-alun Selatan, yang diselenggarakan oleh Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB). Di dalam acara ini, digelar berbagai stan dari kelompok-kelompok atau aliran kepercayaan dan keagamaan yang terdapat di Yogyakarta seperti Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Ahmadiyah, kejawen, dan penghayat kepercayaan.

Di samping membangun interaksi antarorang Tionghoa Muslim yang sama-sama dalam proses pencarian Islam, PITI juga berfungsi sebagai media komunikasi dan kerja sama antara berbagai organisasi Tionghoa. Dalam penyelenggaraan beberapa acara di Yogyakarta, setiap organisasi atau peguyuban diajak untuk turut berpartisipasi, seperti dalam Pekan Budaya Tionghoa³⁰ yang diselenggarakan setiap perayaan Imlek sejak 2006 di daerah Ketandan dan Peh Cun yang dilaksanakan 15 hari setelah Imlek di Pantai Parangtritis, Bantul. Tentu acara semacam ini turut menyertakan elemen masyarakat dan pemerintahan setempat.

Di Yogyakarta sendiri, sejak 1998, telah berdiri berbagai organisasi masyarakat yang mendasarkan pada ketionghoan. Setidaknya ada sepuluh organisasi lokal atau peguyuban orang Tionghoa dengan berbagai latar belakang, antara lain Paguyuban Bhakti Putera, Perhimpunan Warga Cantonese Yogyakarta (Perwacy), Paguyuban Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), Paguyuban Bhakti Loka, Paguyuban Hakka Yogyakarta, Paguyuban Fu Qing, Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (INTI) Pengurus Daerah DI Yogyakarta, Perkumpulan Urusan Kematian Jogjakarta (PUKJ), Paguyuban Alumni Sekolah Tionghoa Indonesia (PASTI), dan Yayasan Persaudaraan Masyarakat Jogjakarta (YPMJ). Sedangkan organisasi sosial umum yang juga banyak orang Tionghoa terlibat di dalamnya antara lain Hash (bidang olahraga), Paguyuban Mitra Masyarakat Yogyakarta (Pamitra), Rotary Internasional, Lion Club, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan Paguyuban

Pedagang Malioboro (PPM).

Pada masa Orde Baru, selain PITI, organisasi di atas yang eksis dan diperbolehkan adalah Paguyuban Budi Abadi, PUKJ, dan Bhakti Loka. Penyebabnya, ketiga organisasi ini hanya melayani pengurusan kematian orang Tionghoa (dua yang awal) dan pernikahan. Sedangkan yang terkait budaya Tionghoa dalam ketiga organisasi ini dikebiri.

Dalam bidang politik, PITI tidak berafiliasi kepada organisasi masyarakat atau partai politik tertentu. Kedekatan beberapa individu yang menjabat dalam struktur kepengurusan PITI dengan organisasi masyarakat atau partai politik tertentu sama sekali bersifat personal. Mengenai faktor kedekatan, salah satunya bisa dilacak dari proses keislaman dan lingkungannya. Di Yogyakarta Tionghoa Muslim memang cenderung bergabung dengan Muhammadiyah dan PAN, meskipun rujukan pada organisasi dan parpol yang lain juga banyak.

F. Kesimpulan

Bagi Tionghoa Muslim yang ada di Yogyakarta, situasi yang digambarkan di atas tampaknya menunjukkan identitas yang berlapis. Beberapa orang Tionghoa mengidentifikasi diri dengan negeri di mana mereka tinggal seraya tetap sadar sebagai orang Tionghoa. Lainnya ada yang sudah melupakan bagaimana makna menjadi orang Tionghoa dan berusaha menemukan kembali ketionghoan mereka. Bahkan ada yang benar-benar tidak menganggap diri lagi sebagai orang Tionghoa. Hal ini membuat kita kesulitan untuk mendefinisikan konsep identitas yang akan digunakan. Namun ini menunjukkan bahwa konsep identitas merupakan konsep yang labil dan memerlukan kualifikasi yang runtut.

Mempertimbangkan berbagai kajian tentang identitas Tionghoa Muslim yang melahirkan sejumlah identitas berdasarkan penekanan masing-masing, tampak bahwa gagasan mengenai identitas mengalami perubahan dan dari waktu ke waktu. Gagasan-gagasan baru muncul seiring dengan berubahnya situasi di tingkat nasional dan di tempat mereka tinggal serta perubahan orang-orang Tionghoa sendiri.

Mengenai fenomena Tionghoa Muslim di Indonesia berdasarkan pengalaman Yogyakarta, tentu banyak mengandung variabel dan unsur yang saling berkelindan. Pendekatan yang kiranya bisa diterapkan dengan tepat adalah pendekatan tentang norma dan pemahaman pada perubahan cara mereka merespons dan mempertahankan norma-norma tersebut. Norma yang dimaksud di sini lebih mengacu kepada standar-standar ideal yang digunakan sebagai pengikat diri dan standar ideal lain yang mereka terima dalam lingkungan mereka yang bukan Tionghoa.

Dalam hal tradisi, Tionghoa Muslim masih memegang atau setidaknya menyelipkan identitas ketionghoannya dalam kehidupan sehari-hari, baik mengenai bahasa dan aksara maupun hubungan-hubungan keluarga, terutama melalui pelaksanaan norma-norma tentang kelahiran, perkawinan, dan kematian. Contoh yang paling jelas di Yogyakarta adalah Tan Jin Sing yang kemudian mendapat gelar Tumenggung Secodiningrat.

Prinsip-prinsip organisasi sosial yang diterapkan dalam pembentukan formasi sosial masyarakat baru seperti yang tecermin dari situasi di atas oleh Habermas disebut sebagai perkembangan masyarakat yang berdimensi komunikatif. Habermas mengartikan prinsip-prinsip organisasi sosial sebagai inovasi-inovasi yang menjadi mungkin melalui tahap-tahap proses belajar yang dapat disusun sesuai logika perkembangan dan yang menginstitutionalisasikan tahap-tahap baru dari proses belajar masyarakat.³¹

Masih menurut Habermas,³² prinsip-prinsip organisasi sosial itu dapat dilihat pada inti institusi yang menentukan bentuk integrasi sosial yang dominan. Prinsip-prinsip organisasi ini berkaitan dengan tindakan-tindakan sosial, khususnya kompetensi tindakan. Ini bermakna bahwa proses belajar masyarakat secara evolusioner tergantung pada kompetensi individu-individu yang menjadi anggota masyarakatnya. Kompetensi ini dikembangkan bukan secara individual dan terisolasi, melainkan lewat interaksi sosial dengan medium struktur-struktur simbolis yang berasal dari dunia kehidupan sehari-hari.

Memasuki periode Orde Baru, gambaran politik Tionghoa Mus-

lim mengalami pembekuan. Salah satu organisasi saluran partisipasi mereka, PITI, dibatasi hingga mengubah penggunaan istilah Tionghoa dalam nama organisasi dari “Persatuan Islam Tionghoa Indonesia” menjadi “Pembina Iman Tauhid Islam”. Sebagaimana nasib Tionghoa lainnya, identitas etnis mereka terdesak hingga paling buncit, sehingga lembaga keluarga menjadi basis pertahanan paling akhir. Karena itu wajar jika pengajian di dalam komunitas Tionghoa Muslim hanya bergulir dari satu rumah ke rumah yang lain. Meskipun sudah memeluk Islam, nama Tionghoa mereka diubah. Penekanan identitas orang Tionghoa Muslim periode ini lebih pada identitas agama (nasional dan lokal), politik (nasional dan lokal), baru kemudian etnisnya. Lewat program asimilasi yang dicanangkan Orde Baru, garis tradisi keislaman orang Tionghoa diarahkan pada tradisi keislaman lokal sesuai dengan tempat tinggal mereka. Misalnya, Tionghoa Muslim yang tinggal di Jawa menyerap Islam Jawa ala NU atau Muhammadiyah.

Paham Pembangunanisme (modernisasi) yang dianut Orde Baru justru membuat Tionghoa Muslim terlibat dalam kebijakan ekonomi negara (arus produksi) tanpa diberi kesempatan untuk menemukan pemahaman terhadap diri dan lingkungan mereka (komunikasi bebas). Logika modernisasi (rasionalitas) yang diemban Orde Baru malah mengantar pada dimensi kerja saja bahkan mengerucut pada kuantitas dan logika mekanistik. Peningkatan jumlah Tionghoa Muslim menjadi target demi program asimilasi yang di balik itu terkandung kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Identitas pun menjadi artifisial dan tanpa makna.

Pasca-Orde Baru dengan semakin terbukanya arus komunikasi, cairnya budaya (tradisi) dan derasnya kapitalisme global membuat pergolakan identitas Tionghoa Muslim menjadi semakin kentara. Setiap individu memilih kompetensinya sesuai dengan potensi dan selera masing-masing.

Dalam norma politik, identitas etnis mendapatkan titik tekan yang dominan. Penggunaan istilah “Tionghoa Muslim” atau “Cina Muslim” lebih populer dibandingkan “Muslim Tionghoa” yang sempat familiar pada 1980-an. Namun dalam penggunaan istilah

“Tionghoa” atau “Cina” masih banyak perbedaan pendapat baik di kalangan umum maupun di kalangan Tionghoa sendiri. Organisasi PITI sebagai saluran partisipasi Tionghoa Muslim mulai rutin mengadakan musyawarah nasional dan menggunakan kembali kedua kepanjangannya secara bersamaan. Isu politik Tionghoa Muslim pun merujuk pada isu-isu yang juga diangkat oleh Tionghoa lain seperti kesamaan hak, eliminasi diskriminasi, undang-undang kewarganegaraan, dan juga penegakan hukum. Sedangkan di tingkat lokal, Tionghoa Muslim masih sama dengan lainnya dalam hal hubungan konsensus dengan pihak Kesultanan. Dimensi budaya (tradisi) juga tampak titik tekan yang sama, yaitu dominannya identitas budaya etnis Tionghoa. Dengan dicabutnya pelarangan terhadap ekspresi kesenian dan tradisi Tionghoa, Tionghoa Muslim di Yogyakarta juga mulai ikut berekspresi, misalnya mulai ikut merayakan hari raya Imlek dengan cara-cara tertentu.[]

Catatan:

¹ Budiman, Amen, *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Tanjung Sari, 1979), hlm. 36.

² Darmasugito, *200 Tahun Kota Yogyakarta (7-10-1756 –7-10-1956)*, (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 th Sub Panitia Penerbitan, 1956), hlm. 7.

³ Andreas Susanto, “Orang Cina di Yogyakarta: Antara Penerimaan dan Penolakan” dalam *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, I. Wibowo (ed.), (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 63.

⁴ Didi Kwartanada, “Kolaborasi dan Resinifikasi: Komunitas Cina Kota Yogyakarta pada Zaman Jepang 1942-1945”, Skripsi pada Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1997, hlm. 39.

⁵ Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta, 1889-1930*, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia), hlm. 48.

⁶ Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan*, hlm. 48.

⁷ Darmasugito, *200 Tahun*, hlm. 23.

⁸ Raffles, *History of Java I*, hlm. 63. Dicatat: “according to a census taken by the British Government in the year 1815.” Lihat hlm. 11; R. Hardjono, “Komuniti Tionghoa Yogyakarta: Sejarah Minoritas Lokal dengan Focus Sosiologis”, Skripsi pada IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, 1970, hlm. 9.

⁹ “Regerings Almanak” Tahun 1905-1910. Lihat Mely G. Tan (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. xii.

¹⁰ Sensus 1920, dikutip Gegevens, 1925, hlm. 138-145. R. Hardjono, “Komuniti Tionghoa”, hlm. 12.

- ¹¹ Volkstelling, 1930, hlm. 9. R. Hardjono, "Komuniti Tionghoa", hlm. 13.
- ¹² BPS Pusat, *Penduduk DIY: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*, (Jakarta: BPS Pusat, 2000), hlm. 75.
- ¹³ BPS Pusat, *Penduduk DIY*, hlm. 57.
- ¹⁴ BPS Pusat, *Penduduk DIY*, hlm. 73-74.
- ¹⁵ T.S. Werdoyo, *Tan Jin Sing: Dari Kapiten Cina Sampai Bupati Yogyakarta*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 5.
- ¹⁶ Werdoyo, *Tan Jin Sing*, hlm. 64-65.
- ¹⁷ Junus Jahya, *Zaman Harapan bagi Keturunan Tionghoa*, (Jakarta: YUI, 1984), hlm. 9-13.
- ¹⁸ Junus Jahja, "3 Tahun Dakwah di Kalangan Keturunan Tionghoa", dalam Junus Jahja (ed.), *Zaman Harapan bagi Keturunan Tionghoa*, (Jakarta: YUI, 1984), hlm. 304.
- ¹⁹ M. Khamim, „Relasi Bisnis Komunitas Muslim Tionghoa dengan Tionghoa Non-Muslim di Kota Yogyakarta: Studi Perspektif Jaringan Sistem Bisnis Tionghoa”, Skripsi pada Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 32.
- ²⁰ Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, terj. Dede Oetomo, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 94-99.
- ²¹ Fahmi Rafika Perdana, *Integrasi Sosial Muslim Tionghoa: Studi atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembauran*, (Yogyakarta: Mystico-PITI, 2008), hlm. 35.
- ²² Perdana, *Integrasi Sosial*, hlm. 37.
- ²³ Perdana, *Integrasi Sosial*, hlm. 38.
- ²⁴ Perdana, *Integrasi Sosial*, hlm. 44.
- ²⁵ "Hasil Mukhtamar Nasional 3 PITI", Hotel Equator Surabaya, 2-4 Desember 2005, hlm. 14.
- ²⁶ "Hasil Mukhtamar", hlm. 31.
- ²⁷ Iman Astri Okta Ayuana, "Organisasi dan Kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta", Tugas Akhir pada Program Studi D-3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007, hlm. 39.
- ²⁸ Ayuana, "Organisasi dan Kegiatan", hlm. 43.
- ²⁹ "PITI Peringati Imlek Bersama", *Bernas*, 1 Maret 2008.
- ³⁰ "Warga Yogya Diminta Mengisi Acara PBT: Diharapkan Menjadi Aset Wisata", *Kompas* edisi Jateng-Jogja, 19 Januari 2006.
- ³¹ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 111; Jürgen Habermas, *Communication and Evolution of Society*, (London, Heinemann, 1979), hlm. 153.
- ³² Hardiman, *Menuju Masyarakat*, hlm. 112; Habermas, *Communication and Evolution*, hlm. 154.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Khozyn, "Sejarah dan Perkembangan PITI: Kiprah PITI di Gelanggang Nasional", dalam *Buku Panduan Seminar dan Musyawarah Wilayah PITI Yogyakarta*, (Yogyakarta: PITI Yogyakarta, 1994).
- Ayuana, Iman Astri Okta, "Organisasi dan Kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Yogyakarta", Tugas Akhir pada Program Studi D-3 Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2007.
- BPS, *Penduduk DIY: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000*, (Jakarta: BPS, 2000).
- BPS DI Yogyakarta, *Penduduk Provinsi DIY: Hasil Registrasi Penduduk Pertengahan Tahun 2003*, (Yogyakarta: BPS DI Yogyakarta, 2003).
- Budiman, Amen, *Masyarakat Islam Tionghoa di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Tanjung Sari, 1979).
- Darmasugito, *200 Tahun Kota Yogyakarta (7-10-1756-7-10-1956)*, (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 Tahun Sub Panitia Penerbitan, 1956).
- Hamim, M., "Relasi Bisnis Komunitas Muslim Tionghoa dengan Tionghoa Non Muslim di Kota Yogyakarta: Studi Perspektif Jaringan Sistem Bisnis Tionghoa", Skripsi di Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kaljaga, 2008.
- Hardiman, F. Budi, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Hardjono, R., "Komuniti Tionghoa Yogyakarta: Sejarah Minoritas Lokal dengan Focus Sosiologis", Skripsi di IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, 1970.
- Jahja, H. Junus (ed.), *Zaman Harapan bagi Keturunan Tionghoa*, (Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islam, 1984).
- Jahja, H. Junus (ed.), *Islam di Mata WNI*, (Jakarta: Yayasan H. Abdul Karim Oei Tjeng Hien, 1995).
- Jahja, H. Junus (ed.), *Masalah Tionghoa di Indonesia: Asimilasi vs Integrasi*, (Jakarta: LPMP, 1999).
- Kwartanada, Didi, "Kolaborasi & Resinifikasi: Komunitas Cina Kota Yogyakarta pada Zaman Jepang 1942-1945", skripsi di Fakultas Sastra UGM Yogyakarta, 1997.
- Rafika Perdana, Fahmi, *Integrasi Sosial Muslim Tionghoa: Studi Atas*

- Partisipasi PITI Korwil Yogyakarta dalam Proses Pembauran*, (Yogyakarta: Mystico-PITI Korwil Yogyakarta, 2008).
- Surjomihardjo, Abdurrachman, *Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta 1889-1930*, (Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia).
- Suryadinata, Leo, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1988).
- Tan, Mely G. (ed.), *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 1979).
- Wibowo, I. (ed.) *Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnik Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Yudawati, Triana. "Relasi Sosial Muslim Tionghoa dan Non Muslim Tionghoa di Kodya Yogyakarta", Skripsi di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Sumber lain:

- Buku Hasil Mukhtamar Nasional 3 PITI*, Hotel Equator, Surabaya, 2-4 Desember 2005.
- Kompas Jateng-Jogja*, 19 Januari 2006.
- Bernas*, 1 Maret 2008.